



RENSTRA 2019 - 2023

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN KAB. LAHAT



DINAS PRKPP KAB. LAHAT

Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat

Tlp./Fax. 0731-322423

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.3.1 Maksud	I.4
1.3.2 Tujuan	I.4
1.4 Sistematika Penulisan	I.4

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II.1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II.20
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan	II.20
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan	II.22

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.8
3.3 Telaah Renstra K/L	III.12
3.3.1 Telaah Renstra Pada Kementerian PUPR	III.12
3.3.2 Telaah Renstra Ditjen Cipta Karya Kemen PU	III.15

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.15
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III.17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV.1
--	------

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan	V.1
----------------------------------	-----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Progran dan Kegiatan	IV.1
--	------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.1
--	-------

BAB VII PENUTUP

7.1 Penutup	VII.1
-------------------	-------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan	II.9
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Per Bidang	II.9
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	II.10
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II.10
Tabel 2.5 Aset yang Dikelola oleh Dinas PRKPP Kab. Lahat	II.11
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PRKPP Kab. Lahat Tahun 2014-2018	II.12
Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan DPRKPP Kab. Lahat	II.19
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi PRKPP kab. Lahat ...	III.5
Tabel 3.2 Kondisi 5 Tahun Kedepan	III.10
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV.2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan	V.2
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan	VI. 2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PRKPP II.8

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat periode 2019 – 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) ditingkat daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2019-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan , serta visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua pegawai baik pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat periode 2019-2023 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Lahat 2019-2023.

Lahat, 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
KAB. LAHAT**

**AHMAD HARTAWAN, ST, MT
PEMBINA TK.1
NIP 19680327 199503 1005**

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki setiap dinas dan instansi sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2019-2023 disusun sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, selain didasarkan pada tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan dan isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat (RPJMD) 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Tambahan Terakhir Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lahat No 47 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas masing –masing Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum keciptakarya dan bidang Pertanahan di Kabupaten Lahat sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan adalah untuk dijadikan pedoman bagi tiap tiap bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program dan rencana prioritas kegiatan. Selain itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 - 2023 ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat. Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 - 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Umum

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas. Uraian tentang struktur organisasi

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat berdasarkan sasaran, target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan atau indikator kinerja pelayanan OPD dan atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab V Strategi dan Arah kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab II

Gambaran Umum

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PU-an yang terdiri atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Serta Undang - Undang tentang Agraria dan Tata Ruang yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria dan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum Kecipta Karya Dan Pertanahan telah dimandatkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi turunan dari Undang-Undang di atas.

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang Kecipta Karya dan Pertanahan terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Perumahan dan Pemukiman, Air Bersih, dan bidang Penyehatan Lingkungan. Sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada bidang Pertanahan. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 dijelaskan pula Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi; Jumlah rata-rata pengajuan izin Pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir, Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG, Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing - masing kawasan dibawah 10 (Ha), Jumlah total luas perumahan, Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir, Indeks resiko bencana Kabupaten/Kota, Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang, Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan

bangunan tertinggi, serta Jumlah jenis bencana Kabupaten/Kota.

2. Indikator Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : Jumlah rata - rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar, Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten/ Kota (Ha), Jumlah subjek hak ulayat dalam satu Kabupaten/Kota.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat. Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya dan pertanahan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Cipta Karya dan Pertanahan,
2. Perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, bimbingan teknis, perencanaan anggaran biaya konstruksi dan gambar serta bangunan sipil lainnya,
3. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta Karya meliputi bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air bersih, penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan bangunan sipil lainnya serta pengendalian dan pengawasan teknis Bidang keciptakarya serta evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana,

4. Perumusan kebijakan umum dibidang cipta karya meliputi : bangunan, perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan dan air bersih,
5. Pemeliharaan, prasarana pengujian bahan bangunan dan melaksanakan koordinasi fungsional dengan instansi terkait,
6. Penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang cipta karya dan pertanahan,
7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan ketata usahaan.

Mengacu kepada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan serta Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan yang membawahi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan layanan dasar dan bidang

Pertanahan yang membawahi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar. Selanjutnya bidang - bidang tersebut dibagi lagi ke dalam sub-sub bidang. Adapun Tugas dan fungsi Masing - Masing Kepala Bidang di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.

Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan :

Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan penataan bangunan.

Fungsi :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan.
2. Mengarahkan, membina dan memberikan petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan dapat terbagi habis dan Terlaksana dengan baik.
3. Merumuskan konsep-konsep sasaran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan.
4. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah.
5. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3
7. Melaporkan Kegiatan Bidang Perumahan dan Prasarana, sarana Utilitas, Umum baik secara bulanan, triwulan, tahunan, maupun secara insidental kepada kepala dinas.

Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan :

Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.

Fungsi :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan , sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
2. Mengarahkan, membina dan memberikan petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
3. Merumuskan konsep-konsep sasaran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
4. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah.
5. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3
7. Melaporkan Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan baik secara bulanan, triwulan, tahunan, maupun secara insidental kepada kepala dinas.

Bidang Pertanahan :**Tugas :**

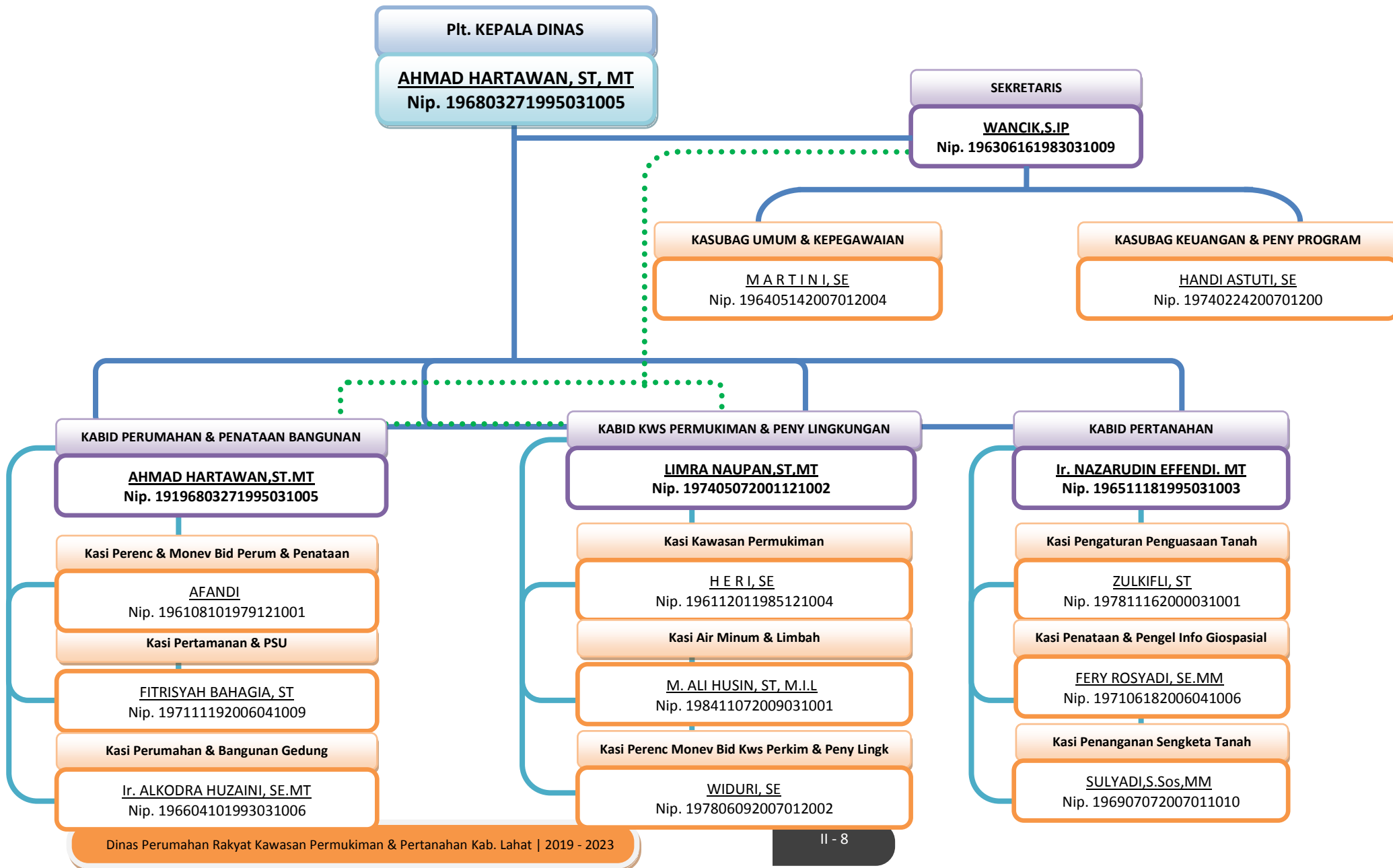
1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pertanahan

Fungsi :

1. Mengarahkan, membina dan memberikan petunjuk kerja pada bawahan supaya tugas-tugas Bidang Pertanahan dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
2. Merumuskan konsep-konsep sasaran tentang peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.
3. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan daerah.
4. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
5. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3
6. Melaporkan Kegiatan Bidang Pertanahan baik secara bulanan, triwulan, tahunan, maupun secara insidental kepada kepala dinas.

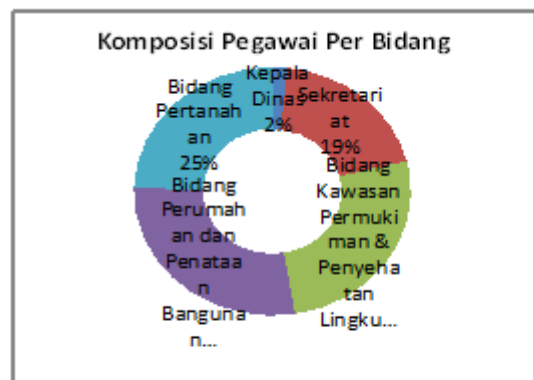
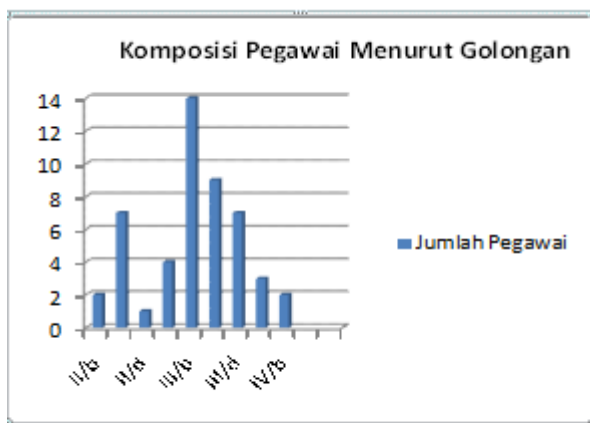
Sedangkan Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat per 1 Januari 2019 ada 49 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam , Tabel 2.2., Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.



No	Pangkat, Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	II/b	2
2	II/c	7
3	II/d	1
4	III/a	4
5	III/b	14
6	III/c	9
7	III/d	7
8	IV/a	3
9	IV/b	2
Jumlah		49

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Plt. Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	12
3	Bidang Kawasan Permukiman & Penyehatan Lingkungan	13
4	Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan	12
5	Bidang Pertanian	11
Jumlah		49

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Per Bidang



No	Jabatan Pegawai	Jumlah Pegawai
1	Esselon III.a	1
2	Esselon III b	3
3	Esselon IV	12
4	Staf	33
Jumlah		49

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki Laki	33
2	Perempuan	16
Jumlah		49

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 1 Januari 2019 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada tabel 2.4. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 2.5
Aset yang Dikelola oleh Dinas PRKPP Kab. Lahat

No.	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	1
2	Kendaraan roda 4	6
3	Kendaraan roda 2	32
4	Komputer Desktop	20
5	UPS	4
6	Pendingin Ruangan (AC)	12
7	Kipas Angin	2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Gambaran Umum kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat
Tahun 2014 - 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Capaian Rasio pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah MCK yang dibangun atau diperbaiki setiap tahunnya				7 Unit	10 Unit	15 Unit	17 Unit	20 Unit	0	9 Unit	10 Unit	7 Unit	18 unit	0,00%	90,00%	66,67%	41,18%	90,00%
2	Panjang SPAL yang dibangun atau diperbaiki untuk mengalirkan limbah rumah tangga				32.000 M'	33.000 M'	34.000 M'	35.000 M'	35.000 M'	31.601 M'	29.916 M'	18.292 M'	31.857 M'	6.591 M'	98,75%	90,65%	53,80%	91,07%	18,83%
3	Panjang Draenase yang dibangun atau diperbaiki				9.500 M'	10.000 M'	10.950 M'	11.500 M'	12000 M'	9.291 M'	8.016 M'	9.519 M'	5.820 M'	2.403 M'	97,80%	80,16%	86,93%	50,61%	20,03%
4	Jumlah jaringan SPAM yang dibangun atau diperbaiki				20 Jaringan	25 Jaringan	30 Jaringan	35 Jaringan	40 Jaringan	23 Jaringan	31 Jaringan	27 Jaringan	7 Jaringan	5 Jaringan	115,00%	124,00%	90,00%	20,00%	12,50%
5	Jumlah gedung negara dan fasilitas publik yang dibangun atau diperbaiki				50 Unit	52 Unit	55 Unit	60 Unit	65 Unit	43 Unit	100 Unit	95 Unit	84 unit	34 Unit	86,00%	192,31%	172,73%	140,00%	52,31%
6	Panjang jalan setapak permukiman yang dibangun atau diperbaiki				23.000 M'	24.500 M'	25.000 M'	25.500 M'	26.000 M'	23.184 M'	45.375 M'	17.732 M'	16.284 M'	5.940 M'	100,80%	185,20%	70,93%	63,86%	22,85%
7	Persentase Luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang				30%	35%	40%	45%	50%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang disusun				0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Jumlah Konflik-konflik pertanahan terfasilitasi				0	0	0	2 Kasus	2 Kasus	0	0	0	0	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	Jumlah tanah milik Pemkab Lahat yang terdata dan digunakan untuk kepentingan umum dengan baik				0	0	0	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel 2.2, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Target Indikator kinerja jumlah MCK dilihat dari realisasi tahun 2014-2018 mengalami naik dan turun (fluktuatif). Hal ini terlihat dari pencapaian Target Indikator Kinerja Jumlah MCK yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2015 sebanyak 10 Unit namun baru bisa direalisasikan 9 unit dengan capaian 90%. Terdapat peningkatan yang signifikan dari realisasi di tahun sebelumnya, dimana Target indikator kinerja jumlah MCK yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2014 adalah sebanyak 10 unit, namun realisasinya masih 0 % (nol persen). Tahun 2017, Indikator Kinerja Jumlah MCK yang dibangun atau diperbaiki adalah 17 Unit namun baru bisa direalisasikan 7 unit dengan capaian 41%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 adalah sebanyak 66,67% jadi terdapat penurunan capaian sebesar 26,67 %. Untuk tahun 2018 Target Indikator Kinerja Jumlah MCK yang dibangun atau diperbaiki adalah sebanyak 20 Unit namun baru bisa direalisasikan 18 unit dengan capaian 90%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya adalah 41% jadi ada kenaikan capaian sebesar 49 %.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Usulan yang masuk untuk pembangunan MCK masih rendah.
2. Dana DAK Sanitasi masih terbatas

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui:

1. Melakukan sosialisasi tentang program Sanitasi yang ada di DPRKPP
2. Peningkatan pendanaan melalui Usulan Dana APBD
3. Usulan Dana Pusat (Hibah)

2. Target Indikator Kinerja Panjang SPAL yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2014 adalah 32.000 M, dan capaiannya 98,75%. Target Indikator Kinerja Panjang SPAL yang dibangun atau diperbaiki untuk mengalirkan limbah rumah tangga Tahun 2015 adalah 33.000 M, realisasi 29.916 m dengan capaian 90,65%. Perbandingan capaian dengan tahun 2014 yaitu 99,13%, adanya penurunan capaian sebesar 8,48%. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2016 dengan Target Indikator Kinerja Panjang SPAL yang dibangun atau diperbaiki untuk mengalirkan limbah rumah tangga sebanyak 34.000 m dengan realisasi sebanyak 18.292 atau 53,80%. Target Indikator Kinerja Panjang SPAL yang dibangun atau diperbaiki untuk mengalirkan limbah rumah tangga Tahun 2017 adalah 35.000 m, realisasi 31.857 m dengan capaian 91,07%. Perbandingan capaian dengan 2016 yaitu 53,80%, adanya kenaikan capaian sebesar 37,27%. Realisasi Target Indikator Kinerja Panjang SPAL yang dibangun atau diperbaiki untuk mengalirkan limbah rumah tangga menurun drastis pada tahun 2018 sebanyak 35.500 m, realisasi 6.591 m dengan capaian 19%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan SPAL yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar
2. Belum adanya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan sehingga belum adanya sistem pengolahan untuk air limbah rumah tangga maupun industri.
3. Keterbatasan ketersediaan penganggaran.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui:

1. Peningkatan pendanaan baik melalui dana APBD maupun APBN
2. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan
3. Target Indikator Kinerja Panjang drainase yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2014 adalah 9.500 M, dan capaiannya 97,8%. Target Indikator Kinerja Panjang drainase yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2015 adalah 10.000 M, terealisasi 8.016 M dengan capaian 80,16%. Perbandingan capaian ditahun 2014 adalah 97,8% ada penurunan pencapaian sebesar 17,64%. Target Indikator Kinerja Panjang drainase yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2017 adalah 11.500 m, terealisasi 5.820 M dengan capaian 51%. Perbandingan capaian ditahun 2016 adalah 87% ada Penurunan pencapaian sebesar 36%. Target Indikator Kinerja Panjang drainase yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2018 adalah 12.000 M, terealisasi 2.402 m dengan capaian 20%. Perbandingan capaian ditahun 2017 adalah 51% ada Penurunan pencapaian sebesar 31%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum adanya pendataan jaringan drainase sehingga kebutuhan akan drainase belum terpetakan.
2. Masih terbatasnya pelayanan drainase yang dapat memberikan kontribusi terhadap daerah genangan
3. Keterbatasan ketersediaan penganggaran

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui:

1. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta dalam meningkatkan dan pemeliharaan jaringan drainase yang telah dibangun
4. Target Indikator Kinerja Panjang SPAM yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2014 adalah 23 unit, dan capaiannya 115%. Target Indikator Kinerja Jumlah jaringan SPAM yang dibangun atau diperbaiki Tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu dengan target indikator sebanyak 25 jaringan, realisasi 31 jaringan dengan capaian 124%, meningkat sebesar 32%. Target Indikator Kinerja Jumlah jaringan SPAM yang dibangun atau diperbaiki Tahun 2017 adalah 35 jaringan, realisasi 7 jaringan dengan capaian 20%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya adanya penurunan sebesar 70%. Target Indikator Kinerja Jumlah jaringan SPAM yang dibangun atau diperbaiki Tahun 2018 adalah 40 jaringan, realisasi 5 jaringan dengan capaian 13%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya adanya penurunan sebesar 57%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.

2. Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air bersih
 2. Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan
 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat
-
5. Target Indikator Kinerja gedung yang dibangun dalam kondisi baik pada Tahun 2014 adalah 43 unit, dengan capaian 86%. Target Indikator Kinerja jumlah gedung negara dan fasilitas publik yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2015 adalah 52 unit, realisasi 100 unit dengan capaian 192,31%. Ada peningkatan capaian sebesar 84,4% dari tahun 2014. Target Indikator Kinerja jumlah gedung negara dan fasilitas publik yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2017 adalah 70 unit, realisasi 84 unit dengan capaian 140%. Ada penurunan capaian sebesar 42,69%. Target Indikator Kinerja jumlah gedung negara dan fasilitas publik yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2018 adalah 65 unit, realisasi 34 unit dengan capaian 52%. Ada penurunan capaian sebesar 88% dari tahun 2017.
 6. Target Indikator Kinerja Panjang jalan setapak permukiman yang dibangun atau diperbaiki pada tahun 2015 adalah 24.500 M terealisasi 45.375 M dengan capaian 185,20%. Perbandingan capaian dengan tahun-tahun pada Tahun 2014 adalah 23184 M, dan capaiannya 100,8%. Adanya peningkatan capaian sebesar 84,4%

Target Indikator Kinerja Panjang jalan setapak permukiman yang dibangun atau diperbaiki Tahun 2017 adalah 25.500 M terealisasi 16.284 M dengan capaian 64%, terjadi penurunan capaian sebesar 7 % dari tahu 2016 sebanyak 71%. Target Indikator Kinerja Panjang jalan setapak permukiman yang dibangun atau diperbaiki adalah 26.000 m terealisasi 5.940 M dengan capaian 23%. Ada penurunan capaian sebesar 41 % dibanding tahun 2017.

7. Target Indikator Kinerja Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai tata ruang belum ada pencapaian atau 0%. Hal ini dikarenakan belum ada kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Tata Ruang terkait semua kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja. Dengan adanya nomenklatur baru Tahun 2017, maka bidang Tata Ruang dihapuskan dari Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat.
8. Target Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang disusun, belum ada pencapaian atau 0%. Dengan adanya nomenklatur baru Tahun 2017, maka bidang Tata Ruang dihapuskan dari dinas perumahan rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat.
9. Target Indikator Kinerja dari Penyelesaian masalah Konflik Bidang Pertanahan tahun 2017 adalah 2 kasus, realisasi 0. Tahun 2018 target Indikator Kinerja dari Penyelesaian masalah Konflik Bidang Pertanahan sebanyak 2 Kasus dan dari 2 Kasus tersebut telah selesai difasilitasi dengan capaian 100%.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat
Tahun 2014 – 2018

No	Jenis MAK	Anggaran Pede tahun ke-					Realisasi Anggaran Pede tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dengan anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	BELANJA OPERASI	10.506.652.598,00	16.717.133.149,00	12.485.737.650,00	22.106.019.650,00	20.008.584.898,00	8.355.135.909,00	13.858.402.495,00	6.901.046.587,00	10.539.104.989,00	16.776.439.580,00	80%	82,90%	55,27%	47,68%	83,85%		
	Belanja Pegawai	557.369.000,00	4.814.958.399,00	219.746.000,00	504.924.000,00	3.485.219.078,00	355.000.000,00	4.268.444.099,00	99.848.000,00	374.186.000,00	3.136.592.981,00	64%	88,65%	45,44%	74,11%	90,00%		
	Belanja Barang dan Jasa	9.949.283.598,00	5.472.174.750,00	4.834.716.650,00	21.601.095.650,00	16.523.365.820,00	8.000.135.909,00	3.392.902.516,00	2.706.188.237,00	10.164.918.989,00	13.639.846.599,00	80%	62,00%	55,97%	47,06%	82,55%		
	Belanja Hibah	-	6.430.000.000,00	7.431.275.000,00	-	-	-	6.197.055.880,00	4.095.010.350,00	-	-	0%	96,38%	55,11%	0,00%	0,00%		
II	BELANJA MODAL	62.829.098.102,00	92.869.301.000,00	75.158.258.200,00	149.894.103.820,00	103.465.981.360,00	60.396.637.412,00	88.405.824.746,23	54.251.972.380,00	82.635.051.085,00	91.129.972.360,00	96%	95,19%	72,18%	55,13%	88,08%		
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	1.550.865.000,00	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.600.000,00	508.000.000,00	98.150.000,00	15.000.000,00	400.000.000,00	129.148.400,00	467.393.750,00	83.150.000,00	-	398.500.000,00	67%	92,01%	84,72%	0,00%	99,63%		
	Belanja modal Gedung dan Bangunan	12.894.636.000,00	18.539.610.000,00	13.167.750.000,00	84.943.850.000,00	51.114.951.360,00	11.612.716.000,00	16.173.266.196,23	9.657.379.000,00	45.263.312.640,00	41.053.944.360,00	90%	87,24%	73,34%	53,29%	80,32%		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan bangunan	48.240.862.102,00	71.516.691.000,00	59.742.358.200,00	62.487.988.820,00	51.951.030.000,00	47.246.881.012,00	70.682.809.800,00	43.335.889.880,00	36.483.055.445,00	49.677.528.000,00	98%	98,83%	72,54%	58,38%	95,62%		
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	1.500.000.000,00	2.305.000.000,00	2.150.000.000,00	896.400.000,00	-	1.407.891.000,00	1.082.355.000,00	1.175.553.500,00	888.683.000,00	-	94%	46,96%	54,68%	99,14%	0,00%		
	Jumlah	73.335.750.700,00	109.586.434.149,00	87.643.995.850,00	172.000.123.470,00	123.474.566.258,00	68.751.773.321,00	102.264.227.241,23	61.153.018.967,00	93.174.156.074,00	107.906.411.940,00	94%	93,32%	69,77%	54,17%	87,39%		

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat menetapkan 3 sasaran target indikator kinerja yang bersumber dari 5 sasaran strategis dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan tabel 2.3, Anggaran dan realisasi dana yang dicapai untuk Tahun 2014 - 2018 berdasarkan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat sudah mencapai keberhasilan yang cukup .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan diantaranya:

1. Target Universal Acces (100-0-100), bahwa tahun 2019 setengah jumlah yang belum mempunyai akses SPAM dan Sanitasi, harus sudah terlayani;
2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
3. Memenuhi backlog perumahan sebesar 66 ribu unit sebagai solusi oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan;
4. Memenuhi target RPJPN 2005-2024 untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh dan target Universal Acces bahwa pada tahun 2019 tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh perkotaan (0 %);

5. Adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi, serta Pertamanan;
6. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
7. Memperluas akses sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
8. Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan, antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur, serta bagian tengah dengan wilayah utara dan selatan);
9. Pemenuhan prasarana dan sarana jalan lingkungan/jalan setapak yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan;
10. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka Hijau/taman di wilayah perkotaan;
11. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum;
12. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah;
13. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia, kebutuhan tanah Pemda dalam 5 tahun;
14. Penanganan sengketa tanah dengan musyawarah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor;
2. Tersedianya jalan lingkungan.jalan setapak yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat;
3. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan cluster pelayanan sangat baik;
4. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman;
5. Masih banyaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman, areal pemakaman umum, dan sebagainya;
6. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi bagi kesehatan serta lingkungan permukiman yang sehat
7. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
8. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan
9. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Lahat, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023, merupakan keberlanjutan dari perencanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Lima tahun pertama Renstra pada saat menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun masih menyisakan berbagai

permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan aset milik dinas belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bidang Perumahan Dan Penataan Bangunan

- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama diperkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
- b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang perumahan.
- c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Belum optimalnya pelayanan eksaminasi teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.

3. Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

- a. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- b. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.

4. Bidang Pertanahan

- a. Belum sempurnanya administrasi kepemilikan lahan sehingga menimbulkan kerusakan dan gejolak lebih adanya pihak - pihak yang berkepentingan pada lahan tersebut.
- b. Belum adanya ketersediaan lahan milik pemerintah dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat.
- c. Belum lengkapnya data - data pertanahan milik pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang disebabkan masih belum mutahirnya sistem informasi data base pertanahan di Kabupaten Lahat.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat

No.	Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	Penanganan genangan akibat tidak berfungsinya drainase lingkungan	Perlu fasilitasi yang lebih besar melalui kementrian PU agar jumlah genangan semakin menurun	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase
		Fasilitasi pembangunan drainase dan gorong-gorong	Provinsi dapat memfasilitasi sebagian pembangunan dan normalisasi drainase	Sistem drainase kota tidak mampu lagi melayani perkembangan kota yang pesat
2	Tersedianya sistem air limbah	Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah	Provinsi dapat memfasilitasi sebagian pembangunan IPAL Komunal	Penyediaan lahan untuk pembangunan Prasarana dan sarana air limbah
3	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase pemenuhan kebutuhan air di pedesaan	Pemerintah pusat memfasilitasi agar kebutuhan air bersih	Kurangnya SDM yang mampu merencanakan sistem penyediaan air bersih dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan

	dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/org/hari	Prosentase pemenuhan kebutuhan air di perkotaan	semakin cepat teratasi (dana DAK dan Program PAMSIMAS)	pemeliharaan terhadap sarana yang sudah terbangun
4	Prosentase rumah tangga khususnya pedesaan memiliki sarana sanitasi yang layak	Penyediaan sarana sanitasi untuk maningkatkan ratio kebiasaan hidup sehat menjadi kewenangan SKPD	Pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan sarana sanitasi (dana DAK melalui Program SANIMAS)	Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terutama pedesaan tentang pentingnya untuk hidup bersih dan sehat
5	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Pengurangan kawasan kumuh melalui kegiatan Penataan kawasan kumuh berupa pembangunan/peningkatan PSU Kawasan kumuh (dana APBD)	Pengurangan kawasan kumuh melalui kegiatan Penataan kawasan kumuh berupa pembangunan/peningkatan PSU Kawasan kumuh (dana APBN)	Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni,

6	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota	Perencanaan Teknis Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Provinsi dapat memfasilitasi dengan memberikan bimbingan teknis	Belum adanya PERDA tentang HSBGN
7	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan informasi sistem online	Provinsi dapat memfasilitasi dengan memberikan bimbingan teknis	Data yang ada belum diperbaharui secara terus menerus
8	Terselesaikanya konflik - konflik pertanahan dikabupaten Lahat	Program peyelesaian konflik - konflik pertanahan	Melakukan mediasi antara pihak - pihak yang berkonflik dengan melibatkan unsur - unsur trifika serta tokoh - tokoh masyarakat	Belum optimalnya penanganan konflik - konflik pertanahan disebabkan masih kurangnya data - data pertanahan khususnya legalitas tanah yang disengketakan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lahat.

Hasil identifikasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2005-2019.

Visi, Misi dan Program Calon Bupati Lahat Tahun 2018-2023 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Lahat merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Lahat.

Menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 -2023 dirumuskan sebagai berikut :

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlaq, Mandiri,
Berkeadilan, Makmur, dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang
Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Lahat di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan (turbinwas) urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum, cipta karya serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu :

No.	Kondisi 5 Tahun kedepan	Peran Dinas PRKPP
1	2	3
1	Kabupaten Lahat yang berakhlak dimaknai dengan meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial.	Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, Bidang Perukiman dan Penyehatan Lingkungan, serta Bidang Pertanahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, Berkeadilan, makmur dan sejahtera melalui pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif.
2	Kabupaten Lahat yang Mandiri dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan social, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.	
3	Kabupaten Lahat yang Berkeadilan dimaknai bahwa pembangunan kabupaten Lahat bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata, tidak nepotisme dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah, etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.	
4	Kabupaten Lahat yang Makmur dan Sejahtera di maknai sebagai kondisi masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteran, damai sentosa dan makmur yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan aman dalam hidupnya.	

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan Kabupaten Lahat 2018-2023, sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintah yang bersih dan inovatif.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
4. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia.
5. Memperkokoh kerukunan hidup beragama dan budaya yang lestari.

Dari kelima Misi Kabupaten Lahat tersebut di atas, maka misi kedua adalah misi yang harus di emban Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola bidang infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya berperan agar infrastruktur di Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan , dalam kondisi yang mantap melalui :

1. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
2. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif	Tujuan 2 Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah Sasaran 4 Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman Sasaran 6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan memadai

3.3 Telaah Renstra K/L

Analisis renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan kabupaten Lahat terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Provinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten Lahat terhadap pencapaian target kinerja di level Provinsi dan nasional.

3.3.1 Telaah Renstra Pada Kementerian PUPR

Telaah renstra pada Kementerian PUPR dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPR yang dikaitkan dengan permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Perumahan Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Lahat. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi

faktor penghambat dan pendorong. Berangkat dari Visi Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka

- mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Renstra Kementerian PUPR merumuskan tujuannya (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/ impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan RENCANA STRATEGIS Dinas perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan pertanahan tahun 2018-2023; daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Sementara sasaran strategis (outcome/Impact pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa

program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

3.3.2 Telaah Renstra Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR

Telaah Renstra Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR Berdasarkan Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019, sasaran strategis yang fokus perhatian Ditjen Cipta Karya adalah **meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan**. Adapun indikator kinerja outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Peninjauan KLHS dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan pertanahan bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Dinas Perumahan rakyat kawasan Permukiman dan pertanahan telah mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra berupa kajian pengaruh rencana program dan langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10).

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan

masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat dapat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Pertanahan

1. Penyelesaian konflik - konflik sengketa pertanahan dengan mengedepankan mediasi melalui pola win - win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
2. Perlunya pemutakhiran sistem informasi pertanahan melalui updating peta dasar pertanahan Kabupaten Lahat untuk menjamin kepastian hak atas tanah terutama tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lahat.
3. Pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lahat

untuk pembangunan fasilitas - fasilitas layanan dasar dan umum bagi masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik dibidang ekonomi maupun kesehatan bagi masyarakat serta membantu kelancaran tugas - tugas pemerintah dalam pelayanannya.

4. Perlunya peningkatan kualitas pengetahuan dan kemampuan bagi aparat dibidang pertanahan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pertanahan guna mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi dari bidang pertanahan
5. Perlunya sosialisasi masalah-masalah pertanahan kepada masyarakat sebagai bentuk vokasi dan pengetahuan dibidang pertanahan bagi masyarakat guna mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik dan sengketa pertanahan.
6. Perlunya melibatkan unsur - unsur terkait baik unsur - unsur pemerintah maupun masyarakat dan agama dalam setiap mediasi masalah - masalah konflik pertanahan di Kabupaten Lahat.

2. Isu strategis Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan

1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
3. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
5. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum.

3. Isu strategis Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan

1. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang

belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas.

2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jamban.
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
4. Kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah
5. Setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, sehingga terdapat *backlog* perumahan .
6. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga

dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
9. Meningkatkan jumlah kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional yang direvitalisasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk penataan lingkungan.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase rumah tinggal berakses air minum	48,48%	60,18%	72,05%	84,09%	96,27%
			Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	5,93%	6,56%	7,22%	14,29%	15,05%
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	84,83%	85,01%	85,23%	85,45%	85,71%
2	Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Penyelesaian kasus tanah Negara	20,00%	30%	42%	56%	72%

Bab

Strategi dan Kebijakan

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2019-2023. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur, dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan			
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mengurangi ketimpangan antarwilayah	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan dan Pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman	Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan kelestarian dan daya dukung lingkungan secara proporsional dengan penataan ruang dalam kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup

Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2019-2023 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat akan melaksanakan 3 program pada urusan P enyehatan Lingkungan, 3 Program pada urusan Perumahan, dan 3 Program pada urusan Pertanahan serta 5 Program pendukung.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1 .

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan pertanahan.

Prestasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/ keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Lahat tahun 2019 - 2023.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					Kondisi Akhir pada Akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase rumah tinggal berakses air minum	36,69%	48,48%	60,18%	72,05%	84,09%	96,27%	96,27%
2	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	2,45%	5,93%	6,56%	7,22%	14,29%	15,05%	15,05%
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	84,83%	84,83%	85,01%	85,23%	85,45%	85,71%	85,71%
4	Penyelesaian kasus tanah Negara	10%	20,00%	30%	42%	56%	72%	72%

Bab VIII

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat 2019-2023 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur , dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat 2019-2023 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat sejahtera menyongsong peradaban baru.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI AWAL PERENCANAAN 2018	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	Baik	Baik	752.770.000	774.896.000	797.512.880	820.687.806	844.406.981	820.687.806	844.406.981	820.687.806	844.406.981	Baik	3.237.503.667
			Kegiatan :														
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	0	820 Materai	4.500.000	4.680.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4690 Materai	19.350.000
			Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis	2 Jenis	2 Jenis	93.000.000	95.790.000	98.663.000	101.622.000	104.670.000	101.622.000	104.670.000	104.670.000	104.670.000	2 Jenis	400.745.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	10 Unit	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	10 Unit	14.200.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional	7	7 Unit	11.000.000	11.330.000	11.669.000	12.020.000	12.380.000	12.020.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	7 Unit	47.399.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis	15	30 Jenis	36.200.000	37.286.000	38.404.580	39.556.717	40.743.419	39.556.717	40.743.419	40.743.419	40.743.419	30 Jenis	155.990.716
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	45 Jenis	45 Jenis	46.974.000	48.500.000	50.000.000	51.500.000	53.045.000	51.500.000	53.045.000	53.045.000	53.045.000	45 Jenis	203.045.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis	15	15 Jenis	25.000.000	25.750.000	26.500.000	27.300.000	28.200.000	27.300.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	15 Jenis	107.750.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Komponen	0	15 Komponen	7.000.000	7.210.000	7.426.300	7.649.089	7.878.562	7.649.089	7.878.562	7.878.562	7.878.562	15 Komponen	30.163.951
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	180 Eks	24.996.000	25.750.000	26.500.000	27.300.000	28.200.000	27.300.000	28.200.000	28.200.000	180 Eks	107.750.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang	60 org	60 Orang	30.000.000	30.900.000	31.800.000	32.750.000	33.700.000	32.750.000	33.700.000	33.700.000	60 Orang	129.150.000	
			Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kantor Daerah	Jumlah SPD	49 spd	50 spd	400.000.000	412.000.000	424.360.000	437.100.000	450.000.000	437.100.000	450.000.000	450.000.000	50 spd	1.723.460.000	
			Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah SPD	42 spd	35 spd	50.000.000	51.500.000	53.000.000	54.600.000	56.200.000	54.600.000	56.200.000	56.200.000	35 spd	215.300.000	
			Penyediaan Jasa Tenaga non PNS	JumI tenaga non PNS	2 orang	2 Org	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	2 Org	83.200.000	
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	IKM	Baik	Baik	426.930.000	412.516.000	434.960.000	444.376.000	463.820.000	444.376.000	463.820.000	444.376.000	463.820.000	Baik	2.182.602.000
			Kegiatan :														
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (tanki)	Jumlah Kendaraan	0	1 Unit	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	1 Unit	420.000.000	
			Pengadaan Komputer	Jumlah Laptop	16 Unit	6 Unit	72.000.000	52.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	4 Unit	304.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang terpelihara	972 M ²	972 M ²	51.030.000	51.516.000	52.000.000	52.486.000	52.972.000	52.486.000	52.972.000	52.972.000	972 M ²	270.702.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dengan baik	39 Unit	39 Unit	297.900.000	300.000.000	310.000.000	315.000.000	330.000.000	315.000.000	330.000.000	330.000.000	39 Unit	1.552.900.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	15 unit	15 unit	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	15 unit	22.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer/laptop yang terpelihara	16 Unit	22 Unit	3.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	42 Unit	33.000.000	
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IKM	Baik	Baik	80.500.000	81.600.000	84.000.000	85.200.000	86.400.000	85.200.000	86.400.000	85.200.000	86.400.000	Baik	417.700.000
			Kegiatan :														
			Pengadaan Pakaiannya Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Baju Olah raga	0	120 Stel	80.500.000	81.600.000	84.000.000	85.200.000	86.400.000	85.200.000	86.400.000	85.200.000	86.400.000	120 Stel	417.700.000
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IKM	Baik	Baik	100.000.000	275.000.000	280.000.000	300.000.000	250.000.000	300.000.000	250.000.000	300.000.000	Baik	1.205.000.000	
			Kegiatan :														
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	0	8 Orang	100.000.000	125.000.000	130.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	48 Orang	605.000.000	
			Kursus , Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bidang Kawasan Permukiman dan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	0	4 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	16 Orang	200.000.000	
			Kursus , Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bidang Pertanian	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	0	4 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	16 Orang	200.000.000	
			Bimbingan Teknis Pengukuran dan Pembuatan Peta Bagi Aparatur	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	0	4 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	16 Orang	200.000.000	
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	BB (74,15)	BB (74,20)	152.000.000	136.000.000	457.000.000	147.500.000	151.000.000	147.500.000	151.000.000	147.500.000	151.000.000	BB (75)	1.043.500.000
			Kegiatan :														
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPP	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	53.000.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000	57.500.000	60.000.000	60.000.000	5 Dokumen	275.500.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5 Dokumen	119.000.000	
			Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	
			Penyusunan Lakip dan RKT	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	27.500.000	28.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10 Dokumen	143.500.000	
			Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	32.000.000	35.000.000	35.000.000	36.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000	20 Dokumen	483.000.000	
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pemuangan aliran air tidak tersumbat	6,16%	6,448%	3.300.000.000	3.450.000.000	3.550.000.000	3.650.000.000	3.750.000.000	3.650.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	7,670%	17.700.000.000	
			Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang terbaharu	46867 M ²	2200 M ²	3.300.000.000	3.400.000.000	3.500.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	11500 M ²	17.500.000.000	
			Inventarisasi Saluran Drainase/Gorong Gorong	Jumlah Dok Inventarisasi	0	1 Dok	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	

Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	17,27%	17,86%	10.800.000.000	18,76%	13.142.500.000	19,56%	14.212.000.000	20,38%	15.627.700.000	21,19%	17.187.470.000	21,19%	70.969.670.000
			Penataan Penguasaan Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (PAT) (Bimtek)	Jumlah Peserta Mengetahui Itg Penatagunaan Tanah dan Pengukuran Tanah	0	50 Orang	50.000.000	50 Orang	52.500.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	57.500.000	250 Orang	270.000.000
			Penyediaan Tanah untuk Fasilitas Umum/Pemerintah/Kantor	Luas Tanah Untuk Fasilitas Umum/Pemerintah/Kantor	137,54	5,5 Ha	10.750.000.000	6,3 Ha	12.045.000.000	6,4 Ha	13.007.500.000	6,5 Ha	14.308.250.000	6,5 Ha	15.739.075.000	32 Ha	65.849.825.000
			Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Tanah Pemerintah yang bersertifikat	0	0	-	11 Sertifikat	110.000.000	12 Sertifikat	121.000.000	13 Sertifikat	133.100.000	14 Sertifikat	146.410.000	50 Sertifikat	510.510.000
			Sosialisasi Standar Baku Proses Pembuatan Alas Hak Pertanahan	Jumlah perangkat Pemerintah yang memahami Proses Pembuatan Alas Hak Tanah	0	0	-	120 orang	220.000.000	120 orang	242.000.000	120 orang	266.200.000	120 orang	292.820.000	480 orang	1.021.020.000
			Penyusunan mekanisme proses penyediaan tanah untuk fasilitas umum/pemerintah/kantor	Dokumen Aturan proses penyediaan tanah untuk fasum/pemerintah/kantor	0	0	-	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	4 Dokumen	765.765.000
			Perencanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum	Dokumen Laporan Penilaian Properti	0	0	-	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen	423.500.000	1 Dokumen	465.850.000	1 Dokumen	512.435.000	4 Dokumen	1.786.785.000
			Pemahaman Administrasi Permaalahan Tanah Maroa, Tanah Adat dan Tanah Ulayat	Pemahaman Administrasi Permaalahan Tanah Maroa, Tanah Adat dan Tanah Ulayat	0	0	-	60 Orang	165.000.000	60 Orang	181.500.000	60 Orang	199.650.000	60 Orang	219.615.000	240 Orang	765.765.000
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase pembangunan turap/Talud/Bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	25,58%	39,48%	7.490.000.000	53,45%	7.550.000.000	67,51%	7.650.000.000	81,63%	7.750.000.000	95,85%	7.800.000.000	95,85%	38.240.000.000
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/ Talud / Bronjong yang terbangun	8096 m'	4400 M'	7.490.000.000	4420 M'	7.500.000.000	4450 M'	7.600.000.000	4470 M'	7.700.000.000	4500 M'	7.750.000.000	22240 M'	38.040.000.000
			Inventarisasi Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Dokumen Inventarisasi Turap/Talud/Bronjong	-	0	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Penyelesaian Konflik -Konflik Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	10,00%	20,00%	200.000.000	30,00%	401.500.000	42,00%	441.650.000	56,00%	484.615.000	72,00%	521.576.500	72,00%	2.049.341.500
			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus sengketa tanah yang terselesaikan	5 Kasus	5 kasus	200.000.000	5 Kasus	220.000.000	6 Kasus	242.000.000	7 Kasus	265.000.000	8 Kasus	280.000.000	31 Kasus	1.207.000.000
			Evaluasi Batas Lahan HGU Perusahaan Perkebunan	Dokumen Pemetaan Lahan Perkebunan	0	-	-	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000	1 Dokumen	241.576.500	4 Dokumen	842.341.500
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase Pengembangan sistem informasi pertanahan	0	0	-	20%	550.000.000	40%	605.000.000	80%	726.851.200	100%	871.200.000	100%	2.753.051.200
			Pengadaan peralatan survey dan pemetaan	Jumlah Peralatan survey dan pemetaan yang memadai	0	0	-	1 Unit	275.000.000	1 Unit	302.500.000	2 Unit	363.425.600	1 Unit	435600000	5 Unit	1.376.525.600
			Pengadaan updating peta dasar	Data terbaru wilayah pemetaan dalam kecamatan	0	0	-	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	302.500.000	1 Dokumen	363.425.600	1 Dokumen	435600000	1 Dokumen	1.376.525.600
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase titik taman terpelihara dan tertata	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	280.000.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	1.145.000.000
			Pemeliharaan dan Penataan Taman	Jumlah Titik taman terpelihara & tertata	21 Titik	21 Titik	250.000.000	21 Titik	275.000.000	21 Titik	280.000.000	21 Titik	290.000.000	21 Titik	300.000.000	21 Titik	1.145.000.000
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase SPAL dalam kondisi baik/ pembangunan aliran air tidak tersumbat	31,05%	33,95%	31.758.320.010	36,88%	41.410.000.000	39,82%	43.760.000.000	42,78%	46.510.000.000	45,77%	50.610.000.000	45,77%	213.598.320.010
			Inventarisasi Sanitasi dan SPAL	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sanitasi dan SPAL	0	0	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	200.000.000
			Penyediaan Sarana/Prasarana Air Limbah	Panjang Saluran Air Limbah	134425 M'	12583 M'	7.550.000.000	12667 M'	7.600.000.000	12750 M'	7.650.000.000	12833 M'	7.700.000.000	12915 M'	7.750.000.000	63748 M'	38.250.000.000
				Persentase rumah tinggal dan berakses air minum	36,69%	48,48%	-	60,18%	-	72,05%	-	84,09%	-	96,27%	-	96,27%	-
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan	Jumlah akses KK terhadap sarana dan prasana air minum	44078 KK	5779 KK	5.200.000.000	5500 KK	8.000.000.000	5600 KK	10.000.000.000	5600 KK	12.000.000.000	5650 KK	15.000.000.000	28129 KK	50.200.000.000
			Pamsimas Reguler	Jumlah akses KK terhadap sarana dan prasana air minum	44078KK	2350 KK	2.110.000.000	2400 KK	2.210.000.000	2500 KK	2.310.000.000	2600 KK	2.410.000.000	2700KK	2.410.000.000	12550 KK	11.450.000.000
			Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum	Jumlah akses KK terhadap sarana dan prasana air minum	44078 KK	6027 KK	6.400.077.010	6000 KK	6.400.000.000	6000 KK	6.500.000.000	6100 KK	6.550.000.000	6100 KK	6.600.000.000	30227 KK	32.450.077.010
			Hibah Air Minum	Jumlah akses KK terhadap sarana dan prasana air minum	44078 KK	0	-	150 KK	700.000.000	160 KK	750.000.000	170 KK	800.000.000	180 KK	800.000.000	860 KK	3.050.000.000
				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	2,45%	5,93%	-	6,93%	-	8,01%	-	19,66%	-	20,91%	-	20,91%	-
			Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah akses KK terhadap sarana dan prasana sanitasi	2947 KK	700 KK	10.498.243.000	1200KK	16.000.000.000	1300 KK	16.500.000.000	1400 KK	17.000.000.000	1500 KK	18.000.000.000	6100 KK	77.998.243.000
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Gedung Negara yang terbangun	100,00%	16,33%	17.284.375.000	29,67%	40.125.000.000	44,67%	45.130.000.000	61,33%	50.135.000.000	74,67%	40.140.000.000	74,67%	192.814.375.000
			Pembangunan/Peningkatan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang terbangun	65 Unit	49 Unit	17.254.375.000	40 Unit	40.000.000.000	45 Unit	45.000.000.000	50 Unit	50.000.000.000	40 Unit	40.000.000.000	187 Unit	192.254.375.000
			Inventarisasi Gedung Negara	Jumlah Dok Inventarisasi	0	0	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000
			Pelatihan Auto Cad Bangunan Gedung	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Auto Cad Bangunan Gedung	0	0	-	10 Org	40.000.000	10 Org	40.000.000	10 Org	40.000.000	10 Org	40.000.000	40 Orang	160.000.000
			Analisa Harga Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Dok Analisa Harga Bahan	5 Dok	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	2 Dok	200.000.000
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah		Program Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan setapak permukiman dalam kondisi baik	23,76%	24,87%	3.600.000.000	26,69%	10.050.000.000	28,66%	11.050.000.000	30,75%	11.850.000.000	32,97%	12.550.000.000	32,97%	49.100.000.000
			Inventarisasi Jalan Setapak Permukiman	Jumlah Dok Inventarisasi	0	0	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000
			Pembangunan Jalan Setapak Permukiman	Panjang Jalan Setapak yang Terbangun	128299 M'	6000 M'	3.600.000.000	6800 M'	4.000.000.000	7400 M'	4.500.000.000	7800 M'	4.800.000.000	8250 M'	5.000.000.000	36250 M'	21.900.000.000
			Pembangunan Jalan Cor Beton Permukiman	Panjang Jalan Cor Beton yang terbangun	-	0	-	3000 M'	6.000.000.000	3250 M'	6.500.000.000	3500 M'	7.000.000.000	3750 M'	7.500.000.000	13500 M'	27.000.000.000

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Program Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	84,83%	84,83%	275.000.000	85,01%	3.275.000.000	85,23%	3.875.000.000	85,46%	4.275.000.000	85,71%	4.775.000.000	85,71%	16.475.000.000
		Peningkatan Kualitas Perumahan bagi MBR	Jumlah Rumah layak huni	47056 unit	0	-	100 unit	3.000.000.000	120 unit	3.600.000.000	130 unit	4.000.000.000	140 unit	4.500.000.000	490 unit	15.100.000.000
		Inventarisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Dokumen RTLH	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000
		Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah Peserta Sosialisasi	0	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000

30075 44.700 31350 130922

8.800

5.758